



RENJA 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan Penyertaannya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung ini dapat diselesaikan.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk membuat Program dan Kegiatan atau Rencana Kerja (RENJA) untuk setiap tahun berjalan. Ini gunanya untuk menjadi usulan Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan APBD Kota Bitung, agar supaya pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung dapat menyusun Rencana Kerja ini, dengan harapan dapat bermakna guna dalam penyusunan APBD Kota Bitung, dan dapat membangun akan masyarakat dan seluruh Aparat Pemerintah Khususnya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung ini.

Bitung, Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG



Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690108 199603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GRAFIK iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMPTSP 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 29

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 29

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 29

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32

4.1 Program dan Kegiatan 32

BAB V PENUTUP 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pengukuran Sasaran Rencana Kerja DPMPPTSP Kota Bitung Tahun 2022	9
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Bitung	10
Tabel 2.3	Jumlah Izin Penanaman Modal yang dikelola Tahun 2022	14
Tabel 2.4	Jumlah Izin Sektor al yang dikelola Tahun 2022	14
Tabel 2.5	Jumlah Perusahaan PMDN Kota Bitung Tahun 2022 berdasarkan Sektor-sektor Unggulan	17
Tabel 2.6	Jumlah Perusahaan PMA Kota Bitung Tahun 2022 berdasarkan Sektor-sektor Unggulan	20
Tabel 2.7	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Program/ Kegiatan s.d 31 Desember Tahun 2022	26
Tabel 3	Tujuan dan Sasaran	31
Tabel 4	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Bitung dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, Peraturan Walikota Bitung Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung menyusun Dokumen Renja 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bitung.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) SKPD, diharapkan sektor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Bitung.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bitung yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal sesuai Peraturan Walikota Bitung Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1) Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD. 2) Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan. 3) Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan. 4) Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung, memiliki Landasan Hukum sbb :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Walikota Bitung Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.3.1.Maksud

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan startegis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPPTSP Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMPPTSP**

Pada Tahun 2022 Rencana Kerja yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung meliputi 6 Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan yaitu :

Program :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Program pengembangan iklim penanaman modal;
3. Program promosi penanaman modal;
4. Program pelayanan penanaman modal;
5. ~~Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;~~
6. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi ~~Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota~~
9. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11. ~~Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota~~
12. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
13. ~~Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota~~

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
10. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
12. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17. Fasilitas Kunjungan Tamu
18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
27. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
28. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
29. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
30. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
31. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
32. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
33. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
34. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

35. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
36. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
37. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
38. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
39. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
40. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Masukan : Rp. 17.160.950,-
Keluaran : Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja
Hasil : Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Masukan : Rp. 6.033.634.243,-
Keluaran : Persentase Capaian Kinerja Keuangan yang tepat waktu, dan sesuai dengan aturan
Hasil : Persentase Capaian Kinerja Keuangan yang tepat waktu, dan sesuai dengan aturan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Masukan : Rp. 171.414.000,-
Keluaran : Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Hasil : Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Masukan : Rp. 341.724.000,-
Keluaran : Prosentase Koordinasi dengan Instansi Terkait
Hasil : Prosentase Koordinasi dengan Instansi Terkait
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Masukan : Rp. 12.185.410.000,-
Keluaran : Belanja Modal untuk Penunjang Pelayanan Kantor
Hasil : Belanja Modal untuk Penunjang Pelayanan Kantor
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Masukan : Rp. 459.256.204,-
Keluaran : Jasa Penunjang Urusan Kantor
Hasil : Jasa Penunjang Urusan Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Masukan : Rp. 182.630.896,-
 Keluaran : Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor
 Hasil : Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor
8. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiayai Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Masukan : Rp. 71.357.500,-
 Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Klinik LKPM yang terlaksana
 Hasil : Jumlah Produk Hukum dan Klinik LKPM yang terlaksana
9. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 Masukan : Rp. 43.635.000,-
 Keluaran : Jumlah Dokumen RUPM, Buku Potensi & Peluang Investasi
 Hasil : Jumlah Dokumen RUPM, Buku Potensi & Peluang Investasi
10. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Masukan : Rp. 30.834.000,-
 Keluaran : Jumlah Bahan Promosi dan Event yang dilaksanakan
 Hasil : Jumlah Bahan Promosi dan Event yang dilaksanakan
11. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 Masukan : Rp. 74.240.500,-
 Keluaran : Pemenuhan Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 Hasil : Pemenuhan Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
12. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Masukan : Rp. 394.654.775,-
 Keluaran : Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal
 Hasil : Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal
13. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Masukan : Rp. 171.425.000,-
 Keluaran : Pemenuhan Fasilitas Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
 Hasil : Pemenuhan Fasilitas Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

Dari total keseluruhan Anggaran Belanja DPMPPTSP Tahun 2022 dengan target anggaran sebesar **Rp. 20.177.377.068,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 19.791.737.229,-** dengan prosentase penggunaan anggaran keseluruhan sebesar **98%**, dan Anggaran Belanja Langsung DPMPPTSP Tahun 2022 dengan target anggaran sebesar **Rp. 14.229.042.400,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 14.150.436.130,-** dengan prosentase penggunaan anggaran keseluruhan dari setiap Program dan Kegiatan sebesar **99,44%**.

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kalau dilihat capaian Program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD, maka dari 6 Program yang ada, 6 Program yang tertuang dalam Renja dapat di cover dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung Tahun 2022 dengan capaian sebesar 98%.

Tabel. 2.1
Hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja DPMP TSP Tahun 2022

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Presentase Pelayanan yang sesuai SOP, dan Tepat Waktu	1.900 Izin	1.370 Izin	72
b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai 85	Nilai 92,22	108
Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart	1.900 Izin	1.370 Izin	72
Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)	PMA : 40 Proyek	PMA : 69 Proyek	172
	PMDN : 450 Proyek	PMDN : 193 Proyek	43
b. Capaian Jumlah Realisasi Investasi	PMA (Rp): 294.798.305.399,-	PMA (Rp): 259.834.160.000,-	88
	PMDN (Rp): 41.846.885.542,-	PMDN (Rp): 45.065.500.000,-	108
c. Jumlah Potensi Unggulan Daerah	3 Sektor	3 Sektor	100
Sasaran Strategis IV			
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi,	2 Event	-	-
b. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik	4 Bahan Promosi	4 Bahan Promosi	100
Sasaran Strategis V			
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Produk-produk Hukum kemudahan berinvestasi,	3 Produk	3 Produk	100

b. Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal	PMA : 7	PMA : 22 Perusahaan	314
	Perusahaan		
	PMDN : 75	PMDN : 99 perusahaan	132
	Perusahaan		

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022 : Rp. 932.520.700,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 : Rp. 745.525.977,-

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD DPMP TSP sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 2.2:

TABEL 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S.D TAHUN 2022

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2024 (kondisi akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renja Tahun 2021 (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (berdasarkan DPPA)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direvisi Tahun 2022 (berdasarkan DPPA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran PD yang direvisi Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD triwulan IV Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d triwulan IV Tahun 2022 (%)
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	6.704.411.605	BB	5.730.278.435	BB	19.391.230.293	BB	16.973.896.985	87,83%	BB	34.730.175.430	389%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	99,35%	9	Dokumen	337%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen LPD/uruk DPMP TSP Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Rangka Tahun 2022 Renja 2021 s.d 2025			4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	95,40%	6	Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Reformasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah			1	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	90,98%	2	Laporan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja DPMP TSP			1	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	98,00%	2	Laporan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan yang tepat waktu, dan sesuai dengan Gai dan Anggaran ASN	90	%	90	%	90	%	85,4	%	94,91%	112,5	%	189%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batas-batas Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		5.628.129.331		5.447.414.228		6.932.634.243		5.725.566.849			11.174.601.873	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batas-batas Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Paket	49	Orang	5.948.334.668	49	Orang	5.641.301.099	94,84%	49	Orang	
Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengupdaten Verifikasi Keuangan SKPD	Batas-batas Verifikasi	1	Paket	300	Dokumen	1.500.000	300	Dokumen	1.500.000	100,00%	1	Paket	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMP TSP	Laporan Akuntansi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMP TSP	2	Laporan	2	Laporan	1.500.000	2	Laporan	1.500.000	100,00%	2	Laporan	
Pengembangan dan Penyajian Rencana Tanggapan Peningkatan	Laporan Tanggapan Peningkatan	1	Laporan	1	Dokumen	1.500.000	1	Dokumen	1.500.000	100,00%	1	Laporan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	4	Laporan	4	Laporan	1.500.000	4	Laporan	1.500.000	100,00%	4	Laporan	
Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	2	Dokumen	1.500.000	2	Dokumen	1.490.000	99,33%	1	Laporan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Memiliki Kualifikasi Kompetensi di Dinas Pemenuhan Budget dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90	%	90	%	90	%	89,75	%	99,72%		176.937.720	100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Peningkatan	-		-		1	Unit	10.000.000	1	Unit	10.000.000	10,00%	
Pengadaan Pakaian Dinas Berserlah Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserlah Kelengkapan	-		-		45	Orang	123.760.000	45	Orang	123.650.000	99,92%	
Berbagai Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Berbagai Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-		-		5	Orang	37.287.720	5	Orang	37.287.720	99,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran di Dinas Pemenuhan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90	%	90	%	90	%	84	%	93,64%	143	%	354%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor	Alat Listrik Kantor	-		-		1	Paket	33.347.500	1	Paket	33.165.500	99,46%	
Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	1	Paket	1	Paket	90.861.000	1	Paket	90.861.000	100,00%	1	Paket	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	-		-		1	Paket	53.747.000	1	Paket	53.746.129	99,998%	
Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-		-		5	Dokumen	6.002.500	5	Dokumen	6.000.000	99,96%	
Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-		10	Laporan	17.918.000	4	Laporan	2.133.000	11,30%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Koordinasi & Konsultasi	-		-		10	Laporan	139.848.000	10	Laporan	134.075.154	95,87%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelayanan Publik	Peralatan Mebel dan Mesin Lainnya	1	Paket	106.532.143		1	Paket	12.185.416.608	1	Paket	12.141.218.600	99,84%	11397%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa Administrasi Kantor	-		-		1	Unit	2.710.000	1	Unit	2.710.000	100,00%	
Pengadaan Alat Tulis Lainnya	Teknis Kantor MPP dan DPMP TSP Kota Bitung	-		-		1	Paket	12.187.700.000	1	Paket	12.138.500.000	99,54%	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (indikator yang terdapat)	Target Bauran PD pada tahun 2022 (persentase dari produk layanan PD)			Realisasi Capaian Bauran PD Tahun 2021 (in %)			Target Kinerja dan Anggaran Biaya PD yang direvisi Tahun 2022 (berdasarkan DPPA)			Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya PD yang direvisi Tahun 2022 (berdasarkan DPPA)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Biaya PD di Tahun 2022 (Akhir Tahun pelaksanaan Bauran PD di tahun 2022)			Tingkat Capaian Bauran PD dan Realisasi Anggaran Biaya PD di tahun 2022 (%)
		4	K	Rp	2	K	Rp	5	K	Rp	6	K	Rp	7	K	Rp	
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	4	Paket	429.373.343	2	Paket	263.863.999	1	Paket	429.252.264	1	Paket	429.893.531	3	Paket	679.668.449	100%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	3.712.000	1	Paket	3.712.000	1	Paket	13.000.000	1	Paket	12.897.960	1	Paket	15.007.960	
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	229.972.403	12	Laporan	229.972.403	12	Laporan	159.917.624	12	Laporan	178.947.413	3	Laporan	418.920.272	
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	12	Laporan	21.800.000	12	Laporan	21.800.000	12	Laporan	21.800.000	12	Laporan	21.800.000	3	Laporan	21.800.000	
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	12	Laporan	234.843.000	12	Laporan	234.843.000	12	Laporan	234.843.000	12	Laporan	218.628.158	10	Laporan	218.628.158	
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	8	Paket	158.113.964	8	Paket	22.743.025	1	Paket	182.856.986	1	Paket	158.867.118	1	Paket	108.910.143	100%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Unit	7.752.125	1	Unit	7.752.125	1	Unit	59.959.896	1	Unit	84.882.312	1	Unit	72.214.437	
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Unit	19.480.114	1	Unit	19.480.114	1	Unit	19.480.114	1	Unit	19.480.114	1	Unit	19.480.114	
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	7.960.000	1	Paket	7.960.000	1	Paket	12.250.000	1	Paket	12.250.000	1	Paket	19.800.000	
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	2	Unit	81.940.000	2	Unit	81.940.000	2	Unit	81.940.000	2	Unit	81.940.000	1	Unit	81.940.000	
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	2	Kegiatan	9.412.500	2	Kegiatan	9.412.500	2	Kegiatan	9.412.500	2	Kegiatan	9.412.500	1	Kegiatan	9.412.500	
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	19.495.174	1	Paket	19.495.174	1	Paket	43.412.479	1	Paket	43.412.479	1	Paket	62.071.644	21%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	19.495.174	2	Unit	19.495.174	2	Unit	22.862.000	2	Unit	22.862.000	1	Unit	42.263.744	
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	2	Unit	20.789.000	2	Unit	20.789.000	2	Unit	20.789.000	2	Unit	20.789.000	2	Unit	20.789.000	
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	60%
Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	Jasa Penyelenggaraan Usaha Kantor	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	36.834.000	1	Paket	31.119.744	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2026 (kondisi akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renja Tahun 2021 (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (berdasarkan DPPA)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022 (berdasarkan DPPA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran PD yang dievaluasi TW IV Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD triwulan IV Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d triwulan IV Tahun 2022 (%)					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K						
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku penanaman modal dengan modal diatas 500 juta yang memiliki Laporan Kerja	90	%	108.697.090	90	%	231.529.609	90	%	394.054.775	80	%	378.398.500	93,88%	91,67	%	629.928.109	580%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	90	%	108.697.090	1	%	231.529.609	4	Dokumen	394.054.775	4	Dokumen	378.398.500	95,89%	1	Dokumen	629.928.109	580%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Profil Hasil Pemantauan, UKPM, dan Notula Rapat Fasilitas Penyelesaian Pemantauan				1	Dokumen	19.211.000	1000	Kegiatan Usaha	8.163.000	1000	Kegiatan Usaha	8.035.500	97,93%	1	Dokumen	25.248.500	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Workshop/ Bimbingan Teknis kontinuitas pelaksanaan Penanaman Modal Sosialisasi dan Bimbingan Penanaman Modal				1	Paket	195.963.000	1000	Paket Usaha	195.205.000	1000	Paket Usaha	192.298.000	93,36%	700	Paket Usaha	348.241.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Produk Hukum mengenai Pemberian izin dan pemantauan kinerja				1	Paket	96.365.900	1000	Kegiatan Usaha	193.226.775	1000	Kegiatan Usaha	193.075.000	98,37%	600	Kegiatan Usaha	256.440.600	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Pemohon Izin yang memanfaatkan Sistem Informasi penanaman modal	1	Paket	228.963.279	-	80	%	171.425.000	80	%	171.425.000	100,00%	11,36	%	171.425.000	75%		
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Fasilitas Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1	Paket	228.963.279	-	1	Paket	171.425.000	1	Paket	171.425.000	100,00%	1	Paket	171.425.000	75%		
Pengolahan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Didat, Dilay dan Diterbitkan	-	1	Dokumen	171.425.000	1	Dokumen	171.425.000	1	Dokumen	171.425.000	100,00%	1	Dokumen	171.425.000			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)				7.624.892,636	97	%	6.183.682,037		20.177.377,008	97,84	%	19.741.737,229	97,84%					
Predikat Kinerja										SANGAT BAIK								
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja										Kerjasama antar ASN di Sekretariat & Bidang-Bidang dalam proses Kinerja Kantor DPMP TSP								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja										Kerjasama koordinasi antara bidang-bidang dan sekretariat dalam proses penyusunan tagihan keuangan								
Tindak Lanjut yang diberikan dalam Renja DPMP										Lebih difokuskan ke koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian kinerja DPMP								

(sesuai Format Tabel T-C.29 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Penjelasan dari Tabel 2.2 adalah sebagai berikut :

- Kolom 3 merupakan kondisi target kinerja sampai dengan tahun 2022,
- Kolom 6 dan 7 merupakan realisasi dan tingkat capaian realisasi tahun 2022,
- Kolom 8 merupakan perkiraan realisasi dan tingkat capaian kinerja Tahun 2022, Renstra periode 2021-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kalau di Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, maka boleh dikatakan Berhasil karena capaian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, prosentase sebesar 97,84 %, sehingga Program dan Kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang diinginkan.

1. Dari Sasaran Strategis yang pertama yaitu : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan* dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Presentase Pelayanan yang sesuai SOP, dan Tepat Waktu	1900 Izin	1.370 Izin	72

a. Prosentase Pelayanan yang sesuai SOP dan tepat waktu.

Penyelesaian berkas pada Tahun 2022 hasil realisasi yang di capai 1.370 Izin atau prosentase sebanyak **72%** dari target 1.900 Izin, yang terdiri dari 49 Jenis Izin meliputi :

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman : 576 Berkas
- Bagian Perekonomian : - Berkas
- Dinas Perhubungan : 170 Berkas
- Dinas Perindag : 19 Berkas
- Dinas Pariwisata : - Berkas
- Dinas PU dan Kimpraswil : - Berkas
- Dinas Lingkungan Hidup : 1 Berkas
- Dinas Kesehatan : 604 Berkas
- Dinas Tenaga Kerja : 17 Berkas
- DPMP TSP : - Berkas

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai 85	Nilai 92,22	108

b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Untuk mengetahui sejauh mana Pelayanan atau kinerja layanan yang diselenggarakan DPMP TSP telah memuaskan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kota Bitung, maka dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Pengukuran SKM dilakukan meilalui pengisian kuesener yang terdiri dari 9 indikator unsur pelayanan. Nilai interval konfersi SKM berdasarkan patokan niai :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Nilai : 25 – 43,75 | Kinerja Pelayanan : Tidak Baik |
| Nilai : 43,76 – 62,50 | Kinerja Pelayanan : Kurang Baik |
| Nilai : 62,51 – 81,25 | Kinerja Pelayanan : Baik |
| Nilai : 81,26 – 100 | Kinerja Pelayanan : Sangat Baik |

Telah dilakukan Survei kepada Masyarakat selaku Pemohon Izin melalui DPMP TSP Kota Bitung mendapatkan prosentase sebesar 108 % dari yang ditargetkan. Jumlah responden sebanyak 1.286 responden diperoleh Nilai rata-rata SKM 92,22 dengan Nilai persepsi “4”, Mutu Pelayanan “A” kategori

Sangat Baik, ini merupakan unsur pelayanan tertinggi pada unsur perilaku petugas dalam memberikan pelayanan.

2. Dari Sasaran Strategis yang kedua yaitu : *Meningkatnya kepemilikan izin sesuai standart yang berlaku, dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :*

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart	1.900 Izin	1.370 Izin	72

a. Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart

Penyelesaian berkas Tahun 2022 DPMP TSP Kota Bitung mengelola 49 Jenis Izin yang terdiri dari 41 Izin Sektoral dan 8 Izin Penanaman Modal, dengan jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 1.370 izin dengan presentase yang telah terealisasi sebesar 72% dari yang direncanakan sebanyak 1.900 Izin. Pengurusan izin cenderung kepada Izin IMB, Tenaga Kesehatan Perawat, ITPMB, dan izin Trayek.

Tabel 2.3
Jumlah Izin Penanaman Modal yang dikelola Tahun 2022

No	NAMA SKPD	JENIS IZIN		JUMLAH	KET
1	2	3		4	5
1	DPMP TSP	1	Izin Prinsip Penanaman Modal	-	
		2	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	-	
		3	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	-	
		4	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal	-	
		5	Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha	-	
		6	Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha	-	
		7	Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha	-	
		8	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha	-	

Tabel 2.4
Jumlah Izin Sektoral yang dikelola Tahun 2022

No	NAMA SKPD	JENIS IZIN		JUMLAH	KET
1	2	3		4	5
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	
		2	Persetujuan Bangunan & Gedung	568	
		3	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	8	
2	Dinas Perdagangan	4	HO	-	
		5	ITPMB	19	
		6	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	

3	Dinas Perhubungan	7	Izin Trayek	170	
4	Dinas Kesehatan	8	Surat Izin Praktek Dokter Umum (SIP-DU)	114	
		9	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis (SIP-DS)	43	
		10	Surat Izin Praktek Dokter Gigi (SIP-DG)	15	
		11	Surat Izin Praktek Perawat (SIP-P)	215	
		12	Surat Izin Praktek Perawat Gigi	4	
		13	Surat Izin Praktek Apoteker (SIP-AP)	26	
		14	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK)	39	
		15	Surat Izin Apotek (SIA)	-	
		16	Surat Izin Praktek Bidan	76	
		17	Surat Izin Klinik Kecantikan	-	
		18	Surat Izin Praktek Perawat GIGI (SIP-PG)	-	
		19	Surat Izin Toko Obat (SITO)	-	
		20	Surat Izin Praktek Dokter Umum (SIP-DU)	-	
		21	Surat Izin Praktek Gizi	8	
		22	Surat Izin Praktik Analis	-	
		23	Surat Izin Klinik	-	
		24	Surat Izin Penyelenggaraan Optik/Optik	2	
		25	Surat Izin Praktek Refraksionis Opticsien	3	
		26	Surat Izin Perekam Medis	2	
		27	Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat	1	
		28	Surat Izin Kerja Elektromedis	1	
		29	Surat Izin Kerja Tenaga Radiografer	4	
		30	Surat Izin Kerja Tenaga Penata Anastosis	2	
		31	Surat Izin Kerja Sanitarian	1	
		32	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	10	
		33	Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga	-	
5	Dinas Tenaga Kerja	34	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	-	
		35	Dana Kompensasi Pembayaran TKA	-	
6	Dinas Lingkungan Hidup	36	Izin Lingkungan	-	
		37	Surat Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	1	

3. Dari Sasaran Strategis yang ketiga yaitu : *Meningkatnya Jumlah Investasi dan Potensi Investasi*, dengan 3 (tiga) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)	PMA : 40 Proyek	PMA : 69 Proyek	172
	PMDN : 450 Proyek	PMDN : 193 Proyek	43

a. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)

Tahun 2022 dengan jumlah penanaman modal untuk Modal Asing (PMA) adalah 69 Proyek dengan prosentase sebanyak 172% dan 193 Proyek untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan prosentase sebanyak 43%.

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
b. Capaian Jumlah Realisasi Investasi,	PMA (Rp):	PMA (Rp):	88
	294.798.305.399,-	259.834.160.000,-	
	PMDN (Rp):	PMDN (Rp):	108
	41.846.885.542,-	45.065.500.000,-	

b. Capaian Jumlah Realisasi Investasi

Untuk Perusahaan PMA dari target rencana investasi senilai Rp. 294.798.305.399,- terealisasi sejumlah Rp. 259.834.160.000,- berarti sudah 88% dari yang direncanakan. Hal itu dimungkinkan karena ada beberapa perusahaan yang rencana investasinya dari tahun sebelumnya dan baru sebagian atau seluruhnya direalisasikan pada Tahun 2022.

Untuk Perusahaan PMDN dari target rencana investasi senilai Rp. 41.846.885.542,- terealisasi sejumlah Rp. 45.065.500.000,-, berarti baru 108% dari yang direncanakan. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan dari sektor perikanan sehingga jumlah realisasi penanaman modal dalam negeri di Kota Bitung mengalami penurunan dan berangsur meningkat tapi secara perlahan.

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
c. Jumlah Potensi Unggulan Daerah	3 Sektor	3 Sektor	100

c. Jumlah Potensi Unggulan Daerah

Jumlah Potensi Unggulan Daerah yang terealisasi selalu memenuhi harapan target 100%, yang menjadi sasaran strategis dalam Meningkatkan Investasi dan potensi investasi yaitu terdiri dari 3 Sektor ; 1) Sektor Primer, 2) Sektor Sekunder (Industri), 3) Sektor Tersier (jasa).

1. Sektor Primer

Sektor primer yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu sektor perikanan sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 realisasi PMDN sebesar Rp.92.190.700,- sedangkan realisasi PMA sebesar Rp. 594.168.888,-.

2. Sektor Sekunder (industri)

Sektor Sekunder (Industri) yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu;

Sektor Industri Kendaraan bermotor dan Alat Transportasi Lainnya sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 pada realisasi PMDN sebesar Rp.96.276.900,- sedangkan Sektor Industri Makanan pada realisasi PMA sebesar Rp. 648.658.715,-

3. Sektor Tersier (Jasa)

Sektor Sekunder (Jasa) yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu;

Pada Realisasi PMDN; Sektor Jasa Perdagangan dan Reparasi, Hotel & Retoran, Jasa Transportasi, gudang, & Komunikasi, dijumlahkan sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp. 94.199.100,- sedangkan pada Realisasi PMA Sektor Jasa Angkutan Laut dalam Negeri, Jasa Transportasi, gudang, & Komunikasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp. 594.168.888,-

4. Dari Sasaran Strategis yang keempat yaitu : *Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi* dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis IV			
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi,	2 Event	0 Event	0

a. Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi

Tidak ada Event yang diikuti sebagai realisasi 0% dari Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi , target 2 Event. Kegiatan Promosi selama Tahun 2020 tidak ada yang diikuti dan tidak dapat dilaksanakan karena adanya Surat Edaran dari Menpan-RB No. 19 Tahun 2020, SK Gubernur Sulawesi Utara No.97 Tahun 2020, dan Surat Edaran Walikota Bitung No. 008/108/WK tentang Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19.

Sasaran Strategis IV			
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
b. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik	4 Bahan Promosi	4 Bahan Promosi	100

b. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik

Jumlah Media Promosi dan informasi Cetak & Elektronik yang ditargetkan 4 Bahan Promosi, realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sudah sebanyak 4 Bahan Promosi sehingga mencapai 100% presentasi ini sesuai dengan yang ditargetkan karena kebutuhan akan Media promosi ini yang selalu diperlukan setiap saat untuk di update dan diinformasikan ke masyarakat dan pihak investor. Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik terdiri dari ;

1. Bahan Promosi Visualisasi :

- Banner,
- Baliho,
- Cenderamata,
- Spanduk.

2. Bahan Promosi Cetak :

- Leaflet,
- Brosur,
- Stiker Besar,
- Stiker Kecil,
- Buku Investment Guide,
- Buku Profil Investasi,
- Buku Profil DPMPPTSP,
- Buku Peta Investasi,
- Buku Peta Potensi.

3. Bahan Promosi Video Visualisasi.

4. Bahan Promosi Media Elektronik seperti Fun Page FB DPMPPTSP.

Semua Jenis Media Promosi dan informasi Cetak & Elektronik dibuat dalam rangka mendukung kegiatan peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi yang ada di Kota Bitung.

5. Dari Sasaran Strategis yang kelima yaitu : *Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal* dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis V			
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Produk-produk Hukum kemudahan berinvestasi,	3 Produk	3 Produk	100

a. Produk-produk Hukum Kemudahan Berinvestasi

Produk Hukum baru maupun perubahan dibuat dalam rangka menyesuaikan dengan adanya;

- 1. Peraturan-peraturan yang lebih tinggi dalam mengatur kegiatan penanaman modal,
- 2. Dampak perubahan aturan-aturan serta perkembangan ekonomi yang mempengaruhi kemudahan berinvestasi,
- 3. Dampak dari perubahan Era Digital sehingga aktivitas-aktivitas pembuatan izin dalam penanaman modal beralih dari manual ke Online System, maka harus menyesuaikan dengan produk-produk hukum yang dibuat.

Produk-produk Hukum kemudahan berinvestasi yang direalisasikan selama Tahun 2022 yaitu;

- 1. Peraturan Walikota Bitung No. 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2. Peraturan Walikota Bitung No. 50 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 3. Peraturan Walikota Bitung No. 51 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk capaian realisasi Produk Hukum baru maupun perubahan yang dihasilkan sampai Tahun 2022 yaitu 3 Produk Hukum dari target 3 Produk Hukum, dengan capaian sebesar 100%.

Sasaran Strategis V			
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
b. Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal	PMA : 7 Perusahaan	PMA : 22 Perusahaan	314
	PMDN : 75 Perusahaan	PMDN : 99 perusahaan	132

b. Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanaman modal.

Jumlah capaian pada Tahun 2022, peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal yang ditargetkan yaitu untuk PMA : 22 Perusahaan dari target 7 Perusahaan dengan Prosentase 314% dan PMDN : 99 Perusahaan dari target 75 Perusahaan dengan Prosentase 132%. Hasil prosentase capaian pada Tahun 2022 meningkat disebabkan karena;

- 1) Kesadaran para penanam modal atau investor untuk menginformasikan hasil kegiatan perusahaan mereka ke DPMPTSP,
- 2) Tindaklanjut dari Pelaku Usaha dalam membuat pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Ada beberapa Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yaitu :

1. Belum maksimalnya pelayanan penanaman modal untuk perbaikan iklim investasi karena belum adanya Rancangan Umum Penanamam Modal (RUPM) Kota Bitung.
2. Pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, tetapi belum berjalan maksimal karena masih terkendala dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan (masih ada izin yang masih diterbitkan oleh instansi teknis terkait).
3. Belum maksimalnya Layanan Sistem Satu Pintu
Akan dilakukan koordinasi dengan instansi teknis terhadap tim teknis layanan perizinan, untuk menempatkan tim teknis layanan perizinan di DPMPTSP sehingga sistem pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah teknis menjadi efektif dan efisien.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan, dan pembiayaan pembangunan daerah tahun sebelumnya. Program prioritas pembangunan daerah memuat program – program yang berorientasi pada pemenuhan hak – hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Sedangkan rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun – tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Tabel 2.7
Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Program/
Kegiatan s.d 31 Desember Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	19.391.230.293,-	18.973.896.995,-	97,85
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.160.950,-	17.050.000,-	99,35
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.033.634.243,-	5.726.586.849,-	94,91
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.414.000,-	170.937.720,-	99,72
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.724.000,-	319.981.777,-	93,64
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.185.410.000,-	12.141.210.000,-	99,64
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	459.256.204,-	429.963.531,-	93,62
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.630.896,-	168.167.118,-	92,08
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	114.992.500,-	114.762.970,-	99,80
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	71.357.500,-	71.350.500,-	99,99
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	43.635.000,-	43.412.470,-	99,49
3	Program Promosi Penanaman Modal	30.834.000,-	30.763.764,-	99,77

3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	30.834.000,-	30.763.764,-	99,77
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	74.240.500 ,-	72.490.000,-	97,64
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	74.240.500 ,-	72.490.000,-	97,64
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	394.654.775,-	378.398.500,-	95,88
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	394.654.775,-	378.398.500,-	95,88
6	Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	171.425.000,-	171.425.000,-	100
6.1	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	171.425.000,-	171.425.000,-	100
Jumlah		20.177.377.068,-	19.741.737.229,-	97,84

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjabaran kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, guna mencapai tujuan dan sasaran. Setiap tahunnya tidak semua program dan kegiatan dapat diakomodir, karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Pada tahun 2022 program yang dijalankan sebanyak 6 program, dan kegiatan yang dijalankan sebanyak 13 kegiatan.

Kalau ditelaah usulan program dan kegiatan masyarakat yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2022 maka ada beberapa Program yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat yang masuk dalam usulan yang ditetapkan yaitu :

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dengan dimasukkannya LKPM oleh pelaku usaha maka peran serta masyarakat selaku pelaku usaha akan menunjang penyampaian data investasi yang ada. Dalam menilai kinerja Aparatur, masyarakat diberikan kesempatan lewat pengisian Survey Kepuasan Masyarakat dalam penilaian pelayanan publik yang dilakukan.

- Program Pelayanan Penanaman Modal.

Memberikan pelayanan kepada pelaku usaha atau masyarakat untuk mengurus izin dengan sistem terbuka dan transparan, juga melakukan sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Penanaman Modal meliputi 7 elemen utama yaitu :

1. Perbaikan iklim penanaman modal
2. Persebaran penanaman modal
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energy
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment)
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK)
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal
7. Promosi penanaman modal

Keterkaitan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung, untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan menyusun program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Arah Kebijakan Penanaman Modal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**3.2.1. Tujuan**

Tujuan yang ditetapkan, mengacu kepada pernyataan Misi yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi, serta sejalan dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan misi.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal.
2. Terwujudnya pelayanan perizinan yang berkualitas.
3. Meningkatkan promosi Kota Bitung sebagai tujuan investasi yang menarik.
4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

5. Meningkatkan realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tersedianya sumber daya manusia yang handal dan profesional.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan elaborasi dari tujuan, dari hasil yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kota Bitung dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan tujuan, berikut penjabaran sasaran RenjaDPMPTSP Kota Bitung yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal.
 - a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan instansi terkait.
 - b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan penunjang operasional kantor.
 - c. Tersusunnya SOP untuk semua jenis pelayanan administrasi kantor
2. Terwujudnya pelayanan perizinan yang berkualitas.
 - a. Terselenggaranya mekanisme pelayanan dengan baik
 - b. Terselenggaranya SOP pelayanan perizinan sesuai aturan.
3. Meningkatkan promosi Kota Bitung sebagai tujuan investasi yang menarik
 - a. Tersedianya data potensi investasi yang akurat
 - b. Meningkatnya jejaring potensi penanaman modal
 - c. Meningkatnya sarana informasi dan promosi
4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.
 - a. Meningkatnya investasi.
 - b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan penanaman modal.
5. Meningkatkan realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Meningkatnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara benar
 - b. Meningkatnya realisasi penanaman modal
 - c. Berkurangnya hambatan dan gangguan pelaksanaan penanaman modal.
6. Tersedianya sumber daya manusia yang handal dan profesional.
 - a. Tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi di bidang tugasnya.
 - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur DPMPTSP.

Tabel 3
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan	1 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1 Presentase Pelayanan yang sesuai SOP, dan Tepat Waktu	90%
			2 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90%
2	Terciptanya Iklim Usaha yang kondusif dan Kemudahan Investasi	1 Meningkatnya kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku	1 Pesentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan Standart	90%
		2 Meningkatnya Jumlah Investasi dan Potensi Investasi	1 Capaian Jumlah Penanaman Modal : PMA PMDN	80% 90%
			2 Capaian Jumlah Realisasi Investasi : PMA PMDN	80% 90%
			3 Jumlah Potensi Unggulan Daerah	90%
		3 Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi	1 Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi	90%
			2 Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik	90%
		4 Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	1 Produk-produk Hukum Kemudahan Berinvestasi	90%
			2 Capaian peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal	90%

(sesuai Format Tabel T-C.32 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan DPMTSP tahun 2024 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD,
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor,
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah,

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

a) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota,

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota,

3. Program Promosi Penanaman Modal

a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota,

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal,
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/ Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

a) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota,

Sub Kegiatan :

- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal,
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan,
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota,

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal,

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- b) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
- Sub Kegiatan :
- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 4

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024	Perkiraan Maju Tahun 2025	Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
					Indikator	Target	Output	Target	Outcome	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SEKRETARIAT															
18	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kota Bitung	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	5.478.684.941	6.026.533.435		DPMTSP	DAU
18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Bitung	Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen				DPMTSP	DAU
18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.625.000	1.787.500		DPMTSP	DAU
18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Bitung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.335.000	1.468.500		DPMTSP	DAU
18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Bitung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.080.000	1.188.000		DPMTSP	DAU
18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kota Bitung	Prosentase Capaian kinerja Keuangan yang tepat waktu dan sesuai aturan	90%	Prosentase Capaian kinerja Keuangan yang tepat waktu dan sesuai aturan	90%	Prosentase Capaian kinerja Keuangan yang tepat waktu dan sesuai aturan	90%				DPMTSP	DAU
18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Bitung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4.745.726.741	5.220.301.615		DPMTSP	DAU
18 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	21.455.000	23.600.500		DPMTSP	DAU
18 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.485.000	1.633.500		DPMTSP	DAU
18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Bitung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.125.000	1.237.500		DPMTSP	DAU
18 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.130.000	1.243.000		DPMTSP	DAU
18 01 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			Kota Bitung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	1.275.000	1.402.500		DPMTSP	DAU
18 01 2.01 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	925.000	1.017.500		DPMTSP	DAU
18 1 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			Kota Bitung	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80%	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80%	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80%				DPMTSP	DAU

KODE				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024	Perkiraan Maju Tahun 2025	Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Sumber Dana	
								Indikator	Target	Output	Target						Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
18	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Kota Bitung	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1.850.000	2.035.000	DPMPTSP	DAU
18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kota Bitung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10.122.000	11.134.200	DPMPTSP	DAU
18	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kota Bitung	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90%	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90%	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90%			DPMPTSP	DAU
18	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Bitung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	9.170.000	10.087.000	DPMPTSP	DAU
18	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Bitung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	148.580.000	163.438.000	DPMPTSP	DAU
18	01	02.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Bitung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	2.750.000	3.025.000	DPMPTSP	DAU
18	01	02.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Bitung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	11.000.000	DPMPTSP	DAU
18	01	02.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	77.566.000	85.322.600	DPMPTSP	DAU
18	01	2.08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah			Kota Bitung	Peralatan Mebel dan Mesin Lainnya	111 Unit	Peralatan Mebel dan Mesin Lainnya	111 Unit	Peralatan Mebel dan Mesin Lainnya	111 Unit			DPMPTSP	DAU
18	01	2.08	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Bitung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	111 Unit	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	111 Unit	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	111 Unit	2.000.000	2.200.000	DPMPTSP	DAU
18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			Kota Bitung	Jasa Penunjang Usuran Kantor	4 Paket	Jasa Penunjang Usuran Kantor	4 Paket	Jasa Penunjang Usuran Kantor	4 Paket			DPMPTSP	DAU
18	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	8.800.000	DPMPTSP	DAU
18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	120.503.200	132.553.520	DPMPTSP	DAU
18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	3.290.000	3.619.000	DPMPTSP	DAU
18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	235.280.000	258.808.000	DPMPTSP	DAU
18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			Kota Bitung	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	7 Paket	Tersedianya Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	7 Paket	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	7 Paket			DPMPTSP	DAU

RENJA DPMPTSP 2024

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024	Perkiraan Maju Tahun 2025	Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Sumber Dana		
								Indikator	Target	Ouput	Target						Outcome	Target
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Bitung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	38.480.000	42.328.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Bitung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	33.930.000	37.323.000		DPMPTSP	DAU
BIDANG P3I																		
18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL			Kota Bitung	Presentase Peningkatan Investasi di Kab/Kota	4,98	Presentase Peningkatan Investasi di Kab/Kota	4,98	Presentase Peningkatan Investasi di Kab/Kota	4,98	16.345.000	17.979.500		DPMPTSP	DAU
18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Kota Bitung	Jumlah Produk Hukum dan Klinik LKPM	1 Paket	Jumlah Produk Hukum dan Klinik LKPM	1 Paket	Jumlah Produk Hukum dan Klinik LKPM	1 Paket				DPMPTSP	DAU
18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Kota Bitung	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	4.800.000	5.280.000		DPMPTSP	DAU
18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			Kota Bitung	Jumlah Dokumen RUPM, Buku Potensi & Peluang Investasi	1 Paket	Jumlah Dokumen RUPM, Buku Potensi & Peluang Investasi	1 Paket	Jumlah Dokumen RUPM, Buku Potensi & Peluang Investasi	1 Paket				DPMPTSP	DAU
18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Kota Bitung	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.365.000	3.701.500		DPMPTSP	DAU
18	02	2.02	04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kab/ Kota			Kota Bitung	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	8.180.000	8.998.000		DPMPTSP	DAU
BIDANG PROMOSI																		
18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Kota Bitung	Persentase Peserta Pelaku usaha yang ikut serta dalam promosi	80%	Persentase Peserta Pelaku usaha yang ikut serta dalam promosi	80%	Persentase Peserta Pelaku usaha yang ikut serta dalam promosi	80%	4.573.000	5.030.300		DPMPTSP	DAU
18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Kota Bitung	Bahan Promosi dan Event yang dilaksanakan	1 paket	Tersedianya Bahan Promosi dan Event yang dilaksanakan	1 paket	Terealisasinya Bahan Promosi dan Event yang dilaksanakan	1 paket				DPMPTSP	DAU
18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.265.000	2.491.500		DPMPTSP	DAU
18	3	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			Kota Bitung	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.308.000	2.538.800		DPMPTSP	DAU

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024	Perkiraan Maju Tahun 2025	Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Sumber Dana	
								Indikator	Target	Output	Target	Outcome						Target
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIDANG PERIZINAN																		
18	4						Kota Bitung	Persentase pemohon izin yang dilayani sesuai SOP	90%	Persentase pemohon izin yang dilayani sesuai SOP	90%	Persentase pemohon izin yang dilayani sesuai SOP	90%	22.027.500	24.230.250		DPMPTSP	DAU
18	04	2.01					Kota Bitung	Pemenuhan Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1 Paket	Pemenuhan Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1 Paket	Pemenuhan Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1 Paket				DPMPTSP	DAU
18	04	2.01	05				Kota Bitung	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi kewenangan Kab/ Kota	14 Dokumen	Terlaksananya Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi kewenangan Kab/ Kota	14 Dokumen	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi kewenangan Kab/ Kota	14 Dokumen	9.097.500	10.007.250		DPMPTSP	DAU
18	04	2.01	06				Kota Bitung	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	14 Pelaku Usaha	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	14 Pelaku Usaha	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	14 Pelaku Usaha	4.330.000	4.763.000		DPMPTSP	DAU
18	04	2.01	07				Kota Bitung	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	120 Pelaku Usaha	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	120 Pelaku Usaha	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	120 Pelaku Usaha	4.150.000	4.565.000		DPMPTSP	DAU
18	04	2.01	08				Kota Bitung	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	14 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	14 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	14 Kegiatan Usaha	4.450.000	4.895.000		DPMPTSP	DAU
BIDANG PENGENDALIAN																		
18	05						Kota Bitung	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	80%	Persentase pelaku penanaman modal dengan modal diatas 500 juta yang memiliki Laporan Kerja	80%	Persentase pelaku penanaman modal dengan modal diatas 500 juta yang memiliki Laporan Kerja	80%	611.333.000	672.466.300		DPMPTSP	DAU/DAK
18	05	2.01					Kota Bitung	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	4 Dokumen	Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	4 Dokumen				DPMPTSP	DAU/DAK
18	05	2.01	06				Kota Bitung	Pengawasan Penanaman Modal	14 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	14 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	14 Kegiatan Usaha	611.333.000	672.466.300		DPMPTSP	DAU/DAK
18	06						Kota Bitung	PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	85%	Prosentase Jumlah Pemohon Izin yang memanfaatkan Sistem Informasi Penanaman Modal	85%	Prosentase Jumlah Pemohon Izin yang memanfaatkan Sistem Informasi Penanaman Modal	85%	2.413.300	2.654.630		DPMPTSP	DAU
18	06	2.01					Kota Bitung	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Paket	Pemenuhan Fasilitas Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1 Paket	Pemenuhan Fasilitas Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1 Paket				DPMPTSP	DAU

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2024	Perkiraan Maju Tahun 2025	Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Sumber Dana		
								Indikator	Target	Ouput	Target						Outcome	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
18	06	2.01	02	Pengolahan, Penyajian Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan & Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Kota Bitung	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	2.413.300	2.654.630		DPMPTSP	DAU
TOTAL														6.135.376.741	6.748.914.415			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung yang berisikan program dan kegiatan disusun sebagai pedoman rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung untuk tahun 2024. Ranwal Renja merupakan tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung yang akan dilaksanakan untuk tahun 2024. Untuk keberhasilan Rencana Kerja (Renja) tersebut harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang memadai, sehingga dapat diwujudkan pelayanan perizinan yang optimal secara terpadu, cepat, tepat, dan akurat.

Bitung, Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG


Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690108 199603 2 001